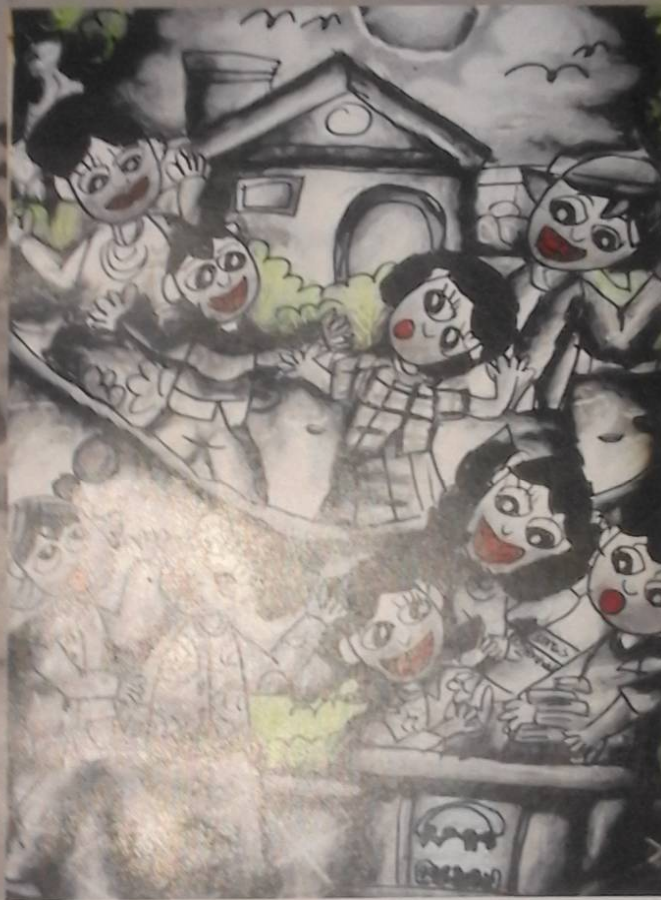


PROGRAM KEMISKINAN



STUDI EVALUASI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANTUL

Suparmini
Gunardo RB
Sri Sugiharti
Nurul Khotimah

**STUDI EVALUASI
PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN BANTUL**

**Penulis:
Suparmini
Gunardo, RB
Sri Sugiharti
Nurul Khotimah**

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan
BKKBN
Jakarta 2014**

Suparmini, d.k.k.
Studi Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten
Bantul, BKKBN Yogyakarta

vi, 43 halaman, 21 x 29 cm

ISBN : 978-602-9133-94-3

1. Penanggulangan Kemiskinan 2. Kab. Bantul
I. Judul 1. Suparmini, 2. Gunardo RB, 3. Sri Sugiharti 4. Nurul Khotimah

PENERBIT:

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan - BKKBN
Cetakan Edisi I, 2014

Editor: Dra. Tjondrorini MKes; Drs. M. Dawam, MPA.
Alamat Jl. Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta 13650
Telpon : (021) 8009029 Ext. 662 Fax : (021) 8008557
Alamat email: naufal_azmi2000@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan dan karuniaNya "Studi Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bantul Penelitian "telah dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BKKBN Pusat yang telah memfasilitasi dana penelitian , Dekan FIS UNY, Ketua Jurusan Pendidikan Geografi UNY yang telah bekerjasama melakukan penelitian ini dengan Peneliti BKKBN Provinsi DIY, Pemerintah Daerah Bantul dan semua informan di Bantul yang telah membantu kelancaran penelitian serta semua pihak yang telah banyak memberikan masukan,

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kebijakan, para pembaca pada umumnya dan civitas akademika.

Yogyakarta, Desember 2011

Kepala Provinsi BKKBN DIY



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
ABSTRAK	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	4
C. Tujuan Penelitian	5
BAB II. STUDI PUSTAKA	6
A. Evaluasi	6
B. Kemiskinan	8
C. Indikator Kemiskinan	8
D. Program Pengentasan Kemiskinan	10
BAB III. METODE PENELITIAN	11
A. Desain Penelitian	11
B. Tempat dan Waktu Penelitian	12
C. Jenis Data	12
D. Metode Pengumpulan Data	12
E. Teknik Analisis Data	12
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	14
A. Profil Kabupaten Bantul	14
B. Profil Kemiskinan Kabupaten Bantul	16
C. Indikator Kemiskinan Kabupaten Bantul	22
D. Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul	31
E. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul	39
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Bantul tahun 2005-2009	2
Tabel 2. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bantul tahun 2008-2009	3
Tabel 3. Indikator keluarga miskin Kabupaten Bantul	9
Tabel 4. Kecamatan dan jenis kelamin Kabupaten Bantul tahun 2010	16
Tabel 5. Perkembangan jumlah KK miskin Kabupaten Bantul tahun 2004-2010	17
Tabel 6. Profil kemiskinan Kabupaten Bantul tahun 2009	19
Tabel 7. Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul tahun 2009 beserta SKPD pengampunya	33
Tabel 8. Anggaran program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2009	35
Tabel 9. Anggaran program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2010	35
Tabel 10. Perkembangan realisasi KESGA Kabupaten Bantul tahun 2010-2011	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul dengan pendekatan indikator	23
Gambar 2. Skema penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul	29
Gambar 3. Alur perencanaan dan penganggaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul	30
Gambar 4. Bagan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan manajerial dan operasional	31

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis pra kondisi pembangunan perdesaan (PODES) dan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul, (2) Menganalisis seberapa efektif penurunan angka kemiskinan dalam mengatasi masalah kemiskinan yang tertuang dalam indikator keluarga miskin Kabupaten Bantul, dan (3) Perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian evaluasi. Model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi kesenjangan. Discrepancy Model Provus yang selanjutnya dianalisis dengan model Cost Benefit Analysis. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul selama 3 bulan, mulai bulan Oktober s.d. Desember 2011. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa tanggapan berbagai instansi terkait, sedangkan data sekunder berupa data pendukung, seperti laporan atau hasil penelitian dari instansi/institusi. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif dalam bentuk tulisan maupun tabel.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Sebagian besar KK miskin di Kabupaten Bantul berjenis kelamin laki-laki (69,3%), berstatus kawin yaitu sebanyak 29.454 KK (64,7%), berpendidikan SD yaitu sebanyak 18.607 KK (39,6%), bekerja sebagai buruh lainnya yaitu sebanyak 12.548 KK (26,7%), pendidikan anak dalam KK miskin adalah SD yaitu sebanyak 14.118 anak (55,7%), dan potensi yang dimiliki anggota keluarga yang berusia 16 tahun ke atas adalah tidak mempunyai keterampilan yaitu sebanyak 34.314 orang (55,5%), (2) Prioritas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul semakin diefektifkan dengan penambahan program yang semula berjumlah 30 program, selanjutnya di tahun 2009 menjadi 50 program, diantaranya 9 program diampu oleh BKK PP dan KB, (3) Keefektifan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan: pada tahun 2009, dengan pemberian bantuan dana sejumlah Rp. 3.459.761,00/KK miskin dapat menurunkan jumlah KK miskin di Kabupaten Bantul sebanyak 10.524 KK miskin, sedangkan pada tahun 2010, dengan pemberian bantuan dana sejumlah Rp. 1.785.546,00/KK miskin dapat menurunkan jumlah KK miskin di Kabupaten Bantul sebanyak 5.535 KK miskin, dan (4) Perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul, antara lain: koordinasi antar instansi, antar pelaku, dan antar wilayah, terwujudnya partisipasi masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan produktivitas keluarga, dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat.

Kata kunci: studi evaluasi, program pengentasan kemiskinan, Kabupaten Bantul

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah membawa semangat perubahan dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan lapangan pekerjaan, dan berkurangnya penduduk miskin. Menyikapi tujuan tersebut diperlukan visi bersama yang mengarah kepada tindakan yang penuh kehati-hatian dan sikap arif dari semua pihak yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam menentukan jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bantul, termasuk di dalamnya masyarakat yang diharapkan dapat lebih berperan sebagai subyek dan pelaksana pembangunan.

Kenyataan menunjukkan bahwa gempa tektonik pada bulan Mei tahun 2006 telah melumpuhkan sendi-sendi ekonomi rakyat di sebagian wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (terutama Kabupaten Bantul) dan Jawa Tengah. Gempa dengan kekuatan 6,3 skala richter (versi USGS) tersebut, terbukti tidak hanya mengakibatkan kerusakan/kehancuran rumah, namun juga tempat pabrik, bahan baku, barang jadi, barang siap ekspor, dan peralatan usaha. Dalam hal ini, sektor yang paling banyak mengalami kerusakan adalah sektor perumahan diikuti oleh sektor produktif, sosial, infrastruktur, dan sektor lainnya.

Dampak langsung yang dapat dilihat akibat kejadian gempa adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan. Di wilayah yang terkena gempa, khususnya Kabupaten Bantul jumlah keluarga miskin meningkat rata-rata sebesar 2%. Pada tahun 2005 (sebelum gempa), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul sebesar 166.220 jiwa orang dengan tingkat kemiskinan sebesar 19,76%. Namun pasca gempa, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan menjadi sebesar 288.035 jiwa orang, dengan tingkat kemiskinan juga meningkat menjadi 32,58%, sehingga dalam hal ini terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan, yaitu sebesar 64,88% (Lihat Tabel 1). Hal ini dikarenakan adanya gempa menyebabkan warga kehilangan sebagian mata pencahariannya.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2005 - 2009

No.	Indikator	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah Jiwa Miskin	166.220	288.035	221.757	186.418	149.159
2.	Persentase	19,76	32,58	24,72	20,49	16,17
	Selisih		64,88%	-24,13%	-17,11%	-21,08%

Sumber: BKK PP KB Kabupaten Bantul tahun 2010

Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat juga bahwa mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul sebesar 221.757 jiwa orang, dengan tingkat kemiskinan sebesar 24,72% atau mengalami penurunan sebesar 24,13% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin sebesar 186.418 jiwa orang, dengan tingkat kemiskinan sebesar 20,49% atau mengalami penurunan sebesar 17,11% dari tahun 2007 dan pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin sebesar 149.159 jiwa orang, dengan tingkat kemiskinan sebesar 16,17% atau mengalami penurunan sebesar 21,08% dari tahun 2008. Perubahan ini cukup menggembirakan, namun permasalahannya apakah perubahan angka kemiskinan ini sudah cukup efektif dalam menangani masalah kemiskinan yang meliputi aspek penghasilan, aspek pangan, aspek sandang, aspek papan, aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek kekayaan, akses air bersih, akses listrik, dan jumlah anggota/jiwa dalam KK (Indikator Keluarga Miskin Kabupaten Bantul).

Persebaran penduduk Kabupaten Bantul yang sebagian besar bermukim di wilayah perdesaan yang mencapai sekitar 63,61% dan sisanya 36,39% bermukim di kawasan perkotaan (Kecamatan Bantul, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Banguntapan) tentunya akan berpengaruh terhadap kebijakan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Jika diasumsikan pertumbuhan penduduk Kabupaten Bantul dalam jangka panjang rata-rata sebesar 1% per tahun,

maka jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2030 diperkirakan akan mencapai kurang lebih 1.158.774 jiwa orang.

Ketimpangan penyebaran penduduk, di satu sisi wilayah perkotaan semakin mengalami peningkatan kepadatan penduduk, sedangkan di wilayah-wilayah perdesaan mengalami perpindahan penduduk menuju kota khususnya kelompok usia muda, produktif, dan lebih terdidik. Di sisi lain wilayah perdesaan mengalami kekurangan tenaga kerja dan sumberdaya manusia yang potensial untuk pembangunan wilayah, sehingga ke depan peningkatan sumberdaya manusia mutlak dilakukan di wilayah-wilayah perdesaan.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bantul tahun 2008, tercatat bekerja sebanyak 435.980 jiwa orang dan yang belum mendapat kesempatan bekerja sebanyak 35.366 jiwa orang. Sedangkan pada tahun 2009 tercatat bekerja sebanyak 468.208 jiwa orang dan yang belum mendapat kesempatan bekerja sebanyak 30.853 jiwa orang (Lihat Tabel 2). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan, sedangkan untuk angkatan kerja yang belum mendapatkan kesempatan bekerja mengalami penurunan.

Tabel 2. Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Bantul tahun 2008 – 2009

No	Kecamatan	Angkatan Kerja 2008		Angkatan Kerja 2009	
		Bekerja	Menganggur	Bekerja	Menganggur
1	Srandakan	16.404	1.147	17.106	879
2	Sanden	16.748	1.864	18.959	1.667
3	Kretek	17.727	2.018	19.270	1.839
4	Pundong	14.244	1.422	15.396	1.270
5	Bambanglipuro	24.646	1.826	25.820	2.692
6	Pandak	27.280	2.295	28.952	1.823
7	Bantul	30.896	2.816	33.846	1.797
8	Jetis	27.429	1.957	29.404	2.199
9	Imogiri	33.476	2.080	36.825	3.855
10	Dlingo	21.374	1.590	23.046	2.137
11	Pleret	17.026	2.398	19.267	2.094
12	Piyungan	17.135	1.522	18.743	942

13	Banguntapan	44.802	3.707	45.126	2.796
14	Sewon	51.179	1.262	49.288	934
15	Kasih	37.163	2.639	43.586	1.843
16	Panjangan	20.349	1.394	22.253	864
17	Sedayu	18.102	3.429	21.321	1.222
	Jumlah	435.980	35.366	468.208	30.853

Sumber : Disnakertras Kabupaten Bantul, 2010

Secara kewilayahan, pengangguran banyak dijumpai di wilayah sub-urban dan wilayah tengah Kabupaten Bantul. Dilihat dari komposisi penguasaan ketrampilan penganggur terlihat bahwa sebagian besar penganggur belum memiliki ketrampilan spesifik yang siap untuk membuka usaha atau mencari kerja. Oleh karena itu, perlu peningkatan kesempatan kerja melalui persiapan tenaga kerja berkualitas serta mendorong tenaga kerja mandiri untuk berpartisipasi di berbagai sektor. Di masa mendatang perlu dilakukan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, program peningkatan kesempatan kerja, dan program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Kenyataan menunjukkan bahwa setiap upaya pembangunan pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang paling dominan adalah keluarga fakir miskin, anak terlantar, penyandang cacat, dan lanjut usia terlantar. Konsentrasi terbesar untuk anak terlantar terdapat di wilayah Kecamatan Srandakan dan Kecamatan Pleret, penyandang cacat di wilayah Kecamatan Sewon, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Jetis, dan lanjut usia terlantar di wilayah Kecamatan Dlingo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Srandakan, Kecamatan Imogiri dan Kecamatan Sewon.

Dari beberapa uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Studi Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bantul" dengan mendasarkan pada data tahun 2005 (sebelum gempa), tahun 2006 (pasca gempa), dan tahun 2007 - 2010.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pra kondisi pembangunan perdesaan (PODES) dan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul?
2. Apakah penurunan angka kemiskinan sudah efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan yang tertuang dalam indikator keluarga miskin Kabupaten Bantul?
3. Bagaimana merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pra kondisi pembangunan perdesaan (PODES) dan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul.
2. Menganalisis seberapa efektif dampak penurunan angka kemiskinan dalam mengatasi masalah kemiskinan yang tertuang dalam indikator keluarga miskin Kabupaten Bantul.
3. Perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Evaluasi

Evaluasi diperlukan sebagai respon terhadap implementasi program penanggulangan kemiskinan yang ditentukan oleh adanya suatu keterbukaan, yang wajib diikuti dengan suatu pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Evaluasi mengandung makna untuk mengubah kondisi saat ini menjadi lebih baik di masa mendatang dengan memperhatikan kebijakan dan paradigma yang ada serta lingkungan.

Dasar yang digunakan adalah sasaran penanggulangan kemiskinan yaitu menurunnya jumlah penduduk miskin dan terpenuhinya hak dasar masyarakat miskin secara bertahap. Evaluasi berfungsi untuk melihat dampak dengan mengisolasi efek dari suatu intervensi. Padapelaksanaanya evaluasi memerlukan data dan metodologi yang lebih kompleks. Evaluasi sendiri dapat berupa dampak apakah proram mencapai tujuan awal, proses bagaimanaprogram dilaksanakan dan apasaja keuntungan yang diterima oleh peserta atau juga analisa biyadari program itu sendiri. Untuk mendapatkan evaluasi yang baik diperlukan data baseline sebagaiacuan dan melakukan perencanaan evaluasi sejak awalseperti menetapkan tujuan, metodologi, jadwal, dan pembiayaan. Metode yang paling baik dalam evaluasi adalah kombinasi darimetode kuantitatif dan kualitatif.

Evaluasi adalah suatu proses untuk membuat penilaian secara sistematis mengenai suatu kebijakan, program, proyek, atau kegiatan berdasarkan informasi dan hasil analisis dibandingkan terhadaprelevansi, keefektifan biaya, dan keberhasilannya untuk keperluan pemangku kepentingan (Bappenas, 2007).

Jenis-jenis evaluasi menurut waktu pelaksanaan (Bappenas, 2007) adalah:

1. Evaluasi formatif:
 - a. Dilaksanakan pada waktu pelaksanaan program.
 - b. Bertujuan memperbaiki pelaksanaan program.
 - c. Temuan utama berupa masalah-masalah dalam pelaksanaan program.
2. Evaluasi summatif:
 - a. Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai.
 - b. Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program.

c. Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program.

Jenis-jenis evaluasi menurut tujuan (Bappenas, 2007) adalah:

1. Evaluasi proses: mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus pada masalah penyampaian pelayanan (*service delivery*).
2. Evaluasi biaya-manfaat: mengkaji biaya program relatif terhadap alternatif penggunaan sumberdaya dan manfaat dari program.
3. Evaluasi dampak: mengkaji apakah program memberikan pengaruh yang diinginkan terhadap individu, rumahtangga, masyarakat, dan kelembagaan.

Berbagai program dilaksanakan setiap tahunnya, sebagian memakan biaya besar, tetapihasil sebenarnya dari program seringkali tidak diketahui. Akibatnya munculpertanyaan-pertanyaan tidak terjawab, antara lain:

1. Apa desain program sudah tepat?
2. Apa sumberdaya tersedia telah digunakan secara efisien?
3. Apa hasil yang dicapai telah sesuai dengan yang diharapkan?

Untuk memberikan jawaban yang tepat terhadap pertanyaan tersebut, maka perlu dilakukakan evaluasi terhadap program yang dijalankan. Berdasarkan tujuannya (Bappenas, 2007), alasan-alasan mengapa suatu program perlu dievaluasi dapat dikelompokkan menjadi:

1. Alasan ekonomi:
 - Memperbaiki desain dan keefektifan program
 - Realokasi sumberdaya dari program yang kurang ke yang lebih efektif
2. Alasan sosial:
 - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
3. Alasan politik:
 - Meningkatkan kredibilitas pengambilan keputusan

Dalam kenyataannya, kendala yang dihadapi adalah evaluasi terhadap suatu program yang telah dijalankan jarang dilakukan dengan berbagai alasan sebagai berikut:

1. Biaya evaluasi mahal.
2. Evaluasi menghabiskan banyak waktu.
3. Secara teknis, evaluasi sulit dilakukan.
4. Temuan evaluasi sering bersifat politis.
5. Laporan evaluasi sering terlambat.

B. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan juga memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur, seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan. Namun demikian, kemiskinan juga memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan juga dengan ketidakmampuan seseorang untuk mencapai aspek di luar pendapatan (*non-income factors*), seperti akses kebutuhan minimum meliputi kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Lebih lanjut kompleksitas dari kemiskinan bukan saja berhubungan dengan pengertian dan dimensinya saja, tetapi juga berkaitan dengan metode pengukuran dan intervensi kebijakan yang diperlukan dalam mengentaskan masalah kemiskinan.

Kemiskinan dan pembangunan seperti dua sisi mata uang, yang saling berkaitan erat satu sama lain. Seperti kita ketahui ada 3 (tiga) faktor yang mengikuti pertumbuhan ekonomi dalam proses pembangunan, yaitu penurunan pengangguran, peningkatan pemerataan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan. Berkaitan dengan masalah kemiskinan, maka suatu proses pembangunan dapat dikatakan baik jika terjadi pengurangan angka kemiskinan. Berbagai penyebab kemiskinan, antara lain: rendahnya tingkat pendidikan, buruknya sistem pemerintahan dan politik, kesalahan pengelolaan perekonomian nasional dan regional, budaya hidup dan nilai-nilai sosial masyarakat, kondisi alam dan kepemilikan sumberdaya alam, serta kondisi perekonomian negara-negara mitra dagang utama (Pemkab Kabupaten Bantul, 2010).

C. Indikator Kemiskinan

Melihat keberagaman wilayah di Indonesia, pengukuran kemiskinan tidak hanya dilakukan untuk tingkat nasional, tetapi juga untuk tingkat provinsi, bahkan tingkat kabupaten/kota seiring pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mengukur perubahan kemiskinan antar waktu dan perbandingan tingkat kemiskinan antar wilayah, diperlukan suatu cara pengukuran tingkat kemiskinan yang dapat dibandingkan, mengingat kemiskinan bersifat multidimensi.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan indikator kemiskinan, antara lain:

1. Menentukan konsep kemiskinan yang akan digunakan.
2. Memetakan sumber data, variabel-variabel, dan metode yang digunakan untuk menyusun indikator kemiskinan.
3. Identifikasi indikator yang dapat digunakan untuk menentukan/mengukur kemiskinan.
4. Mengukur tingkatan indikator, apakah indikator individu atau rumah tangga, indikator agregat (berdasarkan kelompok karakteristik tertentu ataupun kewilayahan).
5. Menyusun indeks komposit dari beberapa indikator dengan memperhatikan karakteristik indikator (positif/negatif) dan bobot untuk setiap indikator tunggal (Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, Bappenas, 2007).

Adapun indikator keluarga miskin di Kabupaten Bantul lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 A Tahun 2007 tentang Indikator Keluarga Miskin Kabupaten Bantul, seperti disajikan dalam Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Indikator Keluarga Miskin Kabupaten Bantul

No.	ASPEK KEMISKINAN	INDIKATOR KEMISKINAN
1.	Aspek Penyebab / Aspek Penghasilan	1. Jumlah penghasilan yang diterima seluruh anggota keluarga yang berusia 16 tahun keatas.
2.	Aspek Penentu Kemiskinan	1. Aspek Pangan (seluruh anggota keluarga tidak mampu makan minimal dua kali dalam sehari) 2. Aspek Sandang (lebih dari sebagian anggota keluarga tidak memiliki pakaian pantas pakai minimal enam stel) 3. Aspek Papan (tempat tinggal/rumah berlantai tanah/berdinding bambu/beratap rumbia)
3.	Aspek Pendukung Kemiskinan	1. Aspek Kesehatan (bila ada anggota keluarga yang sakit, tidak mampu berobat ke fasilitas kesehatan) 2. Aspek Pendidikan (keluarga tidak mampu menyekolahkan anak yang berumur 7 s.d 15 tahun) 3. Aspek Kekayaan (a. jumlah kekayaan milik keluarga, b. tanah dan bangunan yang ditempati bukan milik sendiri) 4. Akses Air Bersih (tidak menggunakan air bersih untuk keperluan makan, minum dan MCK) 5. Akses Listrik (tidak menggunakan listrik untuk kebutuhan rumah tangga) 6. Jumlah anggota/jiwa dalam KK (termasuk kepala keluarga) 5 jiwa atau lebih.

D. Program Pengentasan Kemiskinan

Kunci utama dari keberhasilan suatu kebijakan atau program kemiskinan adalah perumusan yang baik. Perumusan tersebut sangat penting karena kemiskinan merupakan masalah yang memiliki kompleksitas tinggi sehingga diperlukan kebijakan yang sangat bergantung pada situasi dan waktu. Dalam perumusan kebijakan secara ideal perlu dilakukan sesuai dengan pentahapan. Tahap pertama adalah diagnosa dan analisa kemiskinan. Pada tahap ini akan dilakukan pengukuran tingkat kemiskinan, penargetan dan penentuan jenis kebijakan atau program yang ingin dibuat dan hasil yang diharapkan pada tahap ini adalah dimengertinya karakteristik dan faktor yang mempengaruhi kemiskinan.

Ada dua prinsip dasar yang digunakan dalam melakukan penargetan atau menentukan kelompok yang ingin diberi intervensi, yaitu penargetan langsung dan penargetan berdasarkan wilayah. Dalam penargetan langsung akan diketahui dengan jelas siapa dan dimana lokasi keluarga miskin. Umumnya jenis penargetan ini mengalami kesulitan dalam identifikasi sehingga memerlukan survei khusus seperti yang dilakukan pemerintah sebelum mengucurkan bantuan tunai langsung. Penargetan berdasarkan wilayah umumnya dilakukan dengan memilih wilayah yang memiliki rata-rata pendapatan terkecil. Masalah yang timbul dari penargetan jenis ini adalah rawan terhadap kebocoran atau terdapatnya orang yang tidak miskin dalam kelompok penerima bantuan. Hal ini dikarenakan pada wilayah ini seluruh masyarakatnya dianggap miskin. Penargetan jenis ini dapat dilakukan dengan bantuan peta kemiskinan.

Perumusan kebijakan secara tepat dalam membuat program pengentasan kemiskinan bukan segalanya karena program tersebut juga harus berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan dua strategi untuk membuat program menjadi berkelanjutan, yaitu strategi di sisi produksi dan penghidupan. Sisi produksi ini menangani masalah yang berkaitan dengan aktivitas untuk mendorong kelompok miskin memperoleh pendapatan. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa melibatkan mereka dalam kegiatan produksi atau dunia kerja. Melibatkan kelompok miskin dalam kegiatan produksi bermaksud mendorong mereka untuk membuka usaha kecil atau mikro dengan menyediakan bantuan terhadap akses modal, pelatihan teknologi sederhana, infrastruktur pendukung seperti jalan di daerah pedesaan, dan mempermudah pengurusan izin usaha.

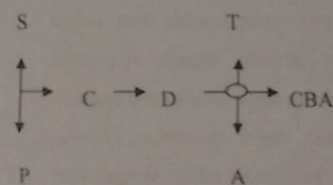
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian evaluasi. Menurut Suharsimi Arikunto (2004 : 13), ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan pada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen. Implementasi program harus senantiasa dievaluasi untuk melihat sejauh mana program tersebut telah berhasil mencapai maksud pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya evaluasi, program-program yang berjalan tidak akan dapat dilihat efektivitasnya. Evaluasi program bertujuan untuk menyediakan data dan informasi serta rekomendasi bagi pengambil kebijakan (*decision maker*) untuk memutuskan apakah akan melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan sebuah program.

Model evaluasi yang dipakai adalah model evaluasi kesenjangan. Discrepancy Model Provus (model kesenjangan pelaksanaan program) dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara standard yang sudah ditentukan dalam program dengan penampilan aktual di program tersebut, seperti terlihat dalam skema berikut ini :



Keterangan:

S = standard; criteria yang ingin dicapai

P = program performance; penampilan aktual program di pencapaian program

C = comparison; membandingkan antara S dan P

D = discrepancy; informasi kesenjangan dihasilkan perbandingan S : P

Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk mengambil suatu keputusan apakah program:

T = terminate; berhenti atau

A = alteration at P or S; membuat program atas Kriteria.

Hasil program selanjutnya dianalisis dengan model cost benefit analysis (CBA) yaitu analisis untung rugi sebagai dampak dari keputusan yang diambil.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Adapun waktu yang diperlukan untuk kegiatan penelitian ini adalah selama 3 bulan, yaitu mulai Bulan Oktober sampai dengan bulan Desember Tahun 2011.

C. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan untuk mendukung kegiatan penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer terkait dengan tanggapan berbagai instansi terkait tentang implementasi program pengentasan kemiskinan di lapangan. Data sekunder merupakan data-data pendukung, seperti laporan atau hasil penelitian dari instansi terkait.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data secara langsung dengan memberikan daftar pertanyaan tertentu kepada responden disesuaikan tujuan penelitian. Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung yang ditujukan kepada obyek penelitian (Irawan Soehartono, 1995: 70). Metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan cara mencatat atau mengumpulkan data angka-angka atau uraian program penanggulangan pengentasan kemiskinan yang telah tersedia pada berbagai instansi terkait.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami, dibaca, dan dipresentasikan (Masri Singarimbun, 1989: 363). Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif.

Dalam operasional penelitian di lapangan, akan dilakukan identifikasi program utama multisektoral yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan sejumlah instrument analisis program yang mencakup deskripsi dan implementasi, koordinasi, sinergi, manfaat dan kelemahan (kinerja) program pengentasan kemiskinan, yang selanjutnya akan dideskripsikan dalam bentuk tulisan maupun tabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kabupaten Bantul

1. Letak, luas, dan penggunaan lahan

Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara $07^{\circ} 44' 04'' - 08^{\circ} 00' 27''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 12' 34'' - 110^{\circ} 31' 08''$ Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Bantul terletak di sebelah Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman,

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia,

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Kidul, dan

Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo (Bantul dalam Angka, 2010).

Posisi administratif Kabupaten Bantul bagian utara yang berbatasan dengan pusat aktivitas ekonomi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menyebabkan kecamatan di Kabupaten Bantul yang berbatasan dengannya tumbuh dan berkembang lebih cepat dibandingkan dengan kecamatan yang berada di sebelah selatan.

Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah $506,85 \text{ km}^2$ dan meliputi 17 kecamatan, yaitu Kecamatan Srandakan, Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Bantul, Jetis, Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, Banguntapan, Sewon, Kasihan, Panjangan, dan Sedayu. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Dlingo yaitu $55,87 \text{ km}^2$ (11,02% dari luas wilayah Kabupaten Bantul), sedangkan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Srandakan yaitu $18,32 \text{ km}^2$ (3,61% dari luas wilayah Kabupaten Bantul). Kabupaten Bantul terdiri dari 75 desa dan 935 dusun. Dari 75 desa yang ada, 41 desa masuk dalam kategori perdesaan dan 34 desa masuk kategori perkotaan.

Kabupaten Bantul menempati 15,90% dari luas wilayah Provinsi DIY, dengan topografi dataran rendah sebesar 40% dan lebih dari separonya (60%) berupa daerah perbukitan yang kurang subur. Secara garis besar terdiri dari:

1. Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas $89,86 \text{ km}^2$ (17,73 % dari seluruh wilayah).
2. Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas $210,94 \text{ km}^2$ (41,62 %).
3. Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas $206,05 \text{ km}^2$ (40,65%), dan
4. Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.

Tata guna lahan di wilayah Kabupaten Bantul, terdiri dari: pekarangan seluas $18.327,15 \text{ Ha}$ (36,16%), sawah seluas $16.823,84 \text{ Ha}$ (33,19%), tegalan seluas $7.554,45 \text{ Ha}$ (14,90%), dan tanah hutan seluas $1.697,80 \text{ Ha}$ (3,35%). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tata guna lahan di Kabupaten Bantul mengalami perubahan cukup signifikan, terutama pada tata guna lahan sawah, namun demikian luas lahan pertanian yang ada masih mampu mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Alih fungsi lahan tersebut harus dikendalikan secara ketat agar tidak mengancam potensi pertanian dan ketersediaan bahan pangan.

Kabupaten Bantul dialiri 6 Sungai yang mengalir sepanjang tahun dengan panjang 114 km, yaitu Sungai Oyo sepanjang 35,75 km, Sungai Opak sepanjang 19,00 km, Sungai Code sepanjang 7,00 km, Sungai Winongo sepanjang 18,75 km, Sungai Bedog sepanjang 9,50 km, dan Sungai Progo sepanjang 24,00 km.

2. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul hasil sensus penduduk tahun 2010 yaitu 910.572 orang, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 453.981 orang dan penduduk perempuan sebanyak 456.591 orang. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Banguntapan yaitu 120.123 orang, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Srandakan yaitu 28.582 orang. Jumlah penduduk Kabupaten Bantul menurut kecamatan dan jenis kelamin tahun 2010 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Bantul Tahun 2010

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Srandakan	14.168	14.414	28.582
2	Sanden	14.551	15.085	29.636
3	Kretek	14.063	15.072	29.135
4	Pundong	15.453	16.150	31.603
5	Bambanglipuro	18.414	18.897	37.311
6	Pandak	23.793	23.881	47.671
7	Bantul	29.458	29.776	59.234
8	Jetis	25.710	26.217	51.927
9	Imogiri	27.755	28.396	56.151
10	Dlingo	17.529	18.013	35.542
11	Pleret	21.626	21.559	43.185
12	Piyungan	24.262	24.384	48.646
13	Banguntapan	60.870	59.253	120.123
14	Sewon	52.722	51.446	104.168
15	Kasih	55.320	55.107	110.427
16	Pajangan	16.282	16.528	32.810
17	Sedayu	22.005	22.413	44.418
	Jumlah	453.981	456.591	910.572

Sumber: BPS, 2010

Penduduk Kabupaten Bantul yang mendiami wilayah dengan luas 506,85 km², sehingga angka kepadatan penduduk Kabupaten Bantul tahun 2010 adalah 1.797 jiwa/km². Kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Banguntapan, yaitu sebesar 4.218 jiwa/km², sedangkan kepadatan terendah adalah Kecamatan Dlingo dengan kepadatan sebesar 636 jiwa/km².

B. Profil Kemiskinan Kabupaten Bantul

1. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul sejak tahun 2007 terus mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Perkembangan Jumlah KK Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2004-2010
PERKEMBANGAN JUMLAH KK MISKIN KABUPATEN BANTUL DARI TAHUN 2004 SAMPAI 2010

No	Kecamatan	2004		2005		2006		JUN 2007		DES 2007		DES 2008		Des 2009		Des 2010	
		JML KK MISKIN	%	JML KK MISKIN	%	JML KK MISKIN	%	JML KK MISKIN	%	JML KK MISKIN	%	JML KK MISKIN	%	JML KK MISKIN	%	JML KK MISKIN	%
1	KRETEK	8.524	1,043	8.087	1,124	8.088	1,124	7.218	26,08	8.223	1,440	8.088	1,442	8.088	1,442	8.088	1,442
2	SANDEN	8.719	1,037	8.068	1,151	8.077	1,151	8.087	28,08	8.253	1,444	8.087	1,444	8.087	1,444	8.087	1,444
3	BANGUNTAHAN	8.217	385	8.244	1,181	8.433	1,269	7.981	20,27	8.264	1,274	8.274	1,274	8.274	1,274	8.274	1,274
4	PANDAK	13.512	1,628	12.246	1,681	13.024	1,811	13.554	42,01	13.894	4.810	14.008	3,776	14.008	3,776	14.008	3,776
5	BAMBANGLIURO	10.281	1,200	11.34	1,617	12.18	1,687	12.534	39,64	11.530	3,289	11.714	2.625	11.714	2.625	11.714	2.625
6	PUNDONG	8.246	749	8.262	2.272	8.246	2.246	8.246	47,24	8.246	1,751	8.246	1,751	8.246	1,751	8.246	1,751
7	BANTUL	16.238	6.132	14.743	4.714	15.728	7.071	15.728	6.844	61,55	16.811	8.271	17.248	4.734	17.248	4.734	17.248
8	DINGO	10.734	2.090	10.737	2.588	11.192	3.494	11.192	34,25	11.468	3.494	11.468	3.494	11.468	3.494	11.468	3.494
9	JETIS	12.074	1.864	14.116	14.651	14.702	14.702	14.702	34,77	16.422	4.599	16.422	4.599	16.422	4.599	16.422	4.599
10	BANTUL	15.232	1.742	16.248	3.467	16.728	3.468	16.728	4,677	16.728	4,677	16.728	4,677	16.728	4,677	16.728	4,677
11	PAJANGAN	9.287	789	9.281	1.410	9.281	1.410	9.281	28,88	9.281	2.478	9.281	2.478	9.281	2.478	9.281	2.478
12	SEDAYU	11.207	1.278	12.278	3.421	12.278	3.421	12.278	3,777	12.278	3,777	12.278	3,777	12.278	3,777	12.278	3,777
13	KASIHAN	22.443	1.847	21.140	3.022	21.140	3.022	21.140	5,442	21.140	5,442	21.140	5,442	21.140	5,442	21.140	5,442
14	BEKON	21.531	2.239	22.278	4.599	22.278	4.599	22.278	8.433	22.278	8.433	22.278	8.433	22.278	8.433	22.278	8.433
15	PIYUNGAN	11.812	2.500	12.216	3.444	12.216	3.444	12.216	4,129	12.216	4,129	12.216	4,129	12.216	4,129	12.216	4,129
16	PLERET	10.565	2.173	10.569	10.569	10.569	10.569	10.569	6.511	10.569	6.511	10.569	6.511	10.569	6.511	10.569	6.511
17	BANTUL	21.218	2.402	21.218	4.421	21.218	4.421	21.218	7.071	21.218	7.071	21.218	7.071	21.218	7.071	21.218	7.071
JAL		220.467	21.206	11.228	226.549	40.577	22.028	222.212	71.303	32.028	240.417	47.899	28.111	246.253	67.829	28.111	246.253

2. Profil kemiskinan Kabupaten Bantul

Di bawah ini merupakan profil kemiskinan Kabupaten Bantul tahun 2009 berdasarkan beberapa kriteria, antara lain jenis kelamin, status perkawinan, status pendidikan kepala keluarga, pekerjaan kepala keluarga, pendidikan anak dalam KK miskin (7-18 tahun), dan potensi yang dimiliki anggota keluarga yang berusia 16 tahun ke atas.

Tabel 6. Profil kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2009

Jenis kelamin		Status perkawinan			Status pendidikan kepala keluarga				
L (%)	P (%)	Kawin	Janda	Duda	Tdk Sklh	SD	PT		
		(pasang)	(orang)	(orang)	(orang)	(orang)	(orang)		
69,3	30,7	29.454	12.669	3.388	17.553	18.607	95		
Pekerjaan kepala keluarga				Pendidikan anak dalam KK miskin (7-18 th)			Potensi yang dimiliki anggota keluarga yang berusia 16 th ke atas		
Buruh lainnya	Tdk Kerja	Buruh tani	Buruh nelayan	SD	SMP	Tdk Sklh	Tdk punya etrampian	Mem-punyai etrampian	Tidak bisa berdayakan
12.548	12.012	7.332	379	14.118	6.931	456	34.314	21.318	6.200

Sumber : Pemkab Bantul tahun 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar KK miskin berjenis kelamin laki-laki (69,3%), berstatus kawin yaitu sebanyak 29.454 KK (64,7%), berpendidikan SD yaitu sebanyak 18.607 KK (39,6%), bekerja sebagai buruh lainnya yaitu sebanyak 12.548 KK (26,7%), pendidikan anak dalam KK miskin

adalah SD yaitu sebanyak 14.118 anak-anak anggota keluarga yang berusia 16 tahun ke atas adalah tidak mempunyai keterampilan yaitu sebanyak 34.314 orang (55,5%).

3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul

Nota pengantar Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2012, menyebutkan bahwa Kabupaten Bantul mempunyai 11 prioritas pembangunan (www.kopel-online.com). Prioritas pembangunan itu diantaranya:

1. Tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab,
2. Pendidikan,
3. Kesehatan,
4. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
5. Pengentasan kemiskinan dan penanganan desa tertinggal,
6. Pertanian dalam arti luas,
7. Industri kecil dan koperasi,
8. Perdagangan dan pasar tradisional,
9. Pariwisata,
10. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, dan
11. Infrastruktur, penataan ruang dan pemukiman.

Dari kesebelas program tersebut ditekankan pada program pengentasan kemiskinan dan penanganan desa tertinggal, yaitu dengan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, pengelolaan sampah dan isu strategis pengembangan wilayah. Selain itu pada tahun 2012 direncanakan akan dibentuk Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA) yang merupakan sharing antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan empat kabupaten dan kota di DIY, sehingga diharapkan di tahun 2014 semua lapisan masyarakat memperoleh jaminan secara baik.

Pelaksanaan program di atas akan bersentuhan secara langsung dengan obyek yaitu penduduk, maka diperlukan beberapa kebijakan kependudukan, yaitu:

1. Keluarga miskin yang merupakan PUS (Pasangan Usia Subur) menjadi sasaran program KB.
2. Keluarga miskin yang potensial menjadi sasaran garapan transmigrasi. (Pemkab Bantul, 2010).

4. Prioritas program pengentasan kemiskinan Kabupaten Bantul

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2006 – 2010 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005, bahwa salah satu program prioritasnya adalah pengentasan kemiskinan, yang meliputi:

1. Validasi data base KK miskin

1). Kebijakan pelaksanaan pendataan:

- Kader tingkat RT (sub PPKBD); sebagai pendata KK miskin.
- Kader tingkat Dusun (PPKBD); berperan dalam penetapan skoring kemiskinan.
- Hasil selanjutnya dibahas dalam sarasehan di tingkat RT / Dusun melalui sarasehan dan hasil ditempel di tingkat Dusun dan Desa.
- Dilaksanakan verifikasi.

2). Pengguna/operasional

- Data keluarga miskin dipergunakan sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan oleh semua unsur / dinas / badan / kantor / bagian / LSM di Kabupaten Bantul.

3). Aparat dan pelaksana

- Aparat dan pelaksana harus memiliki komitmen terhadap kebenaran data serta program pengentasan kemiskinan.

2. Pengurangan beban KK Misk

- 1). Semua program/kegiatan harus berorientasi pada pengurangan angka kemiskinan.
- 2). Aparat/pelaksana memiliki komitmen terhadap turunnya angka kemiskinan.
- 3). Setiap pelaksana wajib memiliki target penurunan angka kemiskinan.
- 4). Penyusunan target/sasaran dengan memanfaatkan data hasil pendataan Keluarga.

5). Pendekatan target/sasaran harus komprehensif.

3. Pemberdayaan

- 1). Intervensi program pengentasan kemiskinan harus berprinsip pemberdayaan keluarga miskin.
- 2). Pemberdayaan merupakan program stimulasi bukan *charity*/santunan.

Prioritas program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul tersebut sejalan dengan Tiga Pilar Program Pengentasan Kemiskinan (<http://ditpk.bappenas.go.id>), yaitu:

1. Pilar pertama adalah program bantuan langsung, seperti bantuan pangan, jaminan kesehatan, dan beasiswa.
2. Pilar kedua berkaitan dengan pemberdayaan manusia melalui pengenalan program dari bawah ke atas dan program/proyck dilaksanakan sendiri.
3. Pilar ketiga adalah pengenalan kredit mikro untuk melakukan program-program kewiraswastaan.

Ketiga pilar tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

C. Indikator Kemiskinan Kabupaten Bantul

Pengentasan kemiskinan tidak lepas dari intervensi indikator kemiskinan serta menuntut pendekatan terpadu (Achmad Djunaedi, 2003 dalam Pemkab Bantul, 2010). BKKBN sejak tahun 1994 juga mengembangkan beberapa indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga, meliputi indikator ekonomi, kesehatan, gizi, dan sosial. BKKBN selanjutnya memetakan kesejahteraan keluarga dalam beberapa tingkatan keluarga, antara lain:

1. Pra Sejahtera,
2. Keluarga Sejahtera I,
3. Keluarga Sejahtera II,
4. Keluarga sejahtera III, dan
5. Keluarga Sejahtera III Plus.

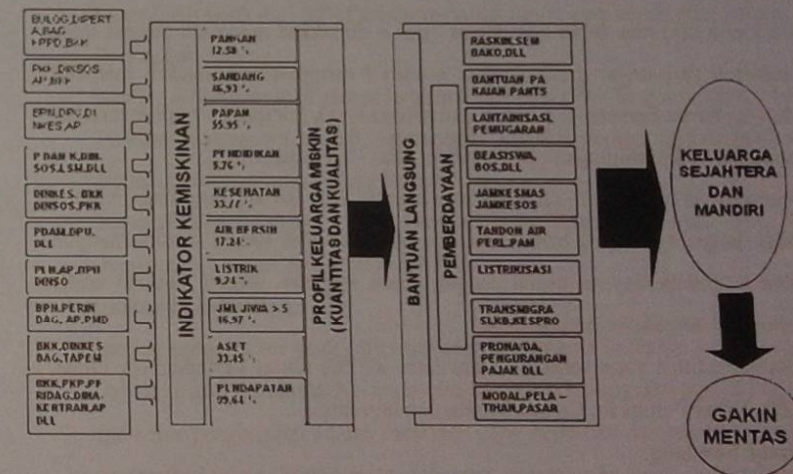
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bantul (Pemkab Bantul, 2010), melakukan intervensi melalui pendekatan indikator keluarga miskin, antara lain:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar secara layak (sandang, pangan dan papan).
2. Penghasilan keluarga di bawah kebutuhan minimum (Rp 800.000,00).
3. Ketidakmampuan mengakses fasilitas pelayanan kebutuhan dasar (kesehatan, pendidikan, listrik, dan air bersih).
4. Kekayaan yang dimiliki kurang dari Rp 2.500.000,00 (asset, tanah dan rumah), tanah dan bangunan yang ditempati bukan miliknya, dan
5. *Family size* lebih dari 5 orang.

Upaya pengentasan kemiskinan melalui pendekatan indikator keluarga miskin memerlukan persyaratan sebagai berikut:

1. Pendekatan tersebut harus terpadu, komprehensif, dan terstruktur,
2. Bentuk intervensi program adalah fasilitasi dan pemberdayaan,
3. Kebijakan fasilitasi berupa hibah (askes, beasiswa, pelatihan ketrampilan, lantainisasi, raskin, bantuan pakaian pantas pakai, dll); sedangkan kebijakan pemberdayaan berupa stimulasi atau pinjaman bergulir, dan
4. Pelibatan semua unsur menjadi kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul secara komprehensif dapat dilihat dari gambar di bawah ini.



Gambar 1. Skema Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bantul dengan Pendekatan Indikator

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa penanggung jawab program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul adalah berbagai SKPD pengampu program penanggulangan kemiskinan (pronangkis), antara lain: Bulog, Diperta, Bagian KPPD, BKK, PKK, Dinsos, AP, BPN, DPU, Dinkes, P dan K, LSM, PDAM, PLN, Perindag, PMD, Bagian Tapem, PKP, Dinakertran, dan lain-lain.

SKPD pengampu pronangkis di Kabupaten Bantul melakukan upaya pengentasan kemiskinan melalui pendekatan indikator keluarga miskin, antara lain:

1. Indikator Pangan:

- seluruh anggota keluarga tidak mampu makan minimal dua kali sehari (Rp.1.500,00; untuk satu kali makan per jiwa),
- menggambarkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan, terutama yang berkaitan dengan: ketidakmampuan seluruh anggota keluarga makan minimal dua kali dalam sehari,
- pengertian makan adalah makanan pokok yang berlaku pada keluarga bersangkutan, dalam pendataan diindeksikan dengan harga Rp. 1.500,00 untuk sekali makan per jiwa,
- harga satu kali makan berkisar Rp.1.500,00 per jiwa adalah harga pasar semua komponen/unsur yang diperlukan untuk menghasilkan makanan dengan harga Rp.1.500,00,
- meskipun satu atau lebih komponen / unsur dimaksud diperoleh dengan tidak membeli (misalnya: gratis / milik sendiri / menghasilkan sendiri, membeli dengan harga bersubsidi / raskin dan sebagainya), komponen / unsur tersebut tetap harus diperhitungkan berdasarkan nilai / harga pasarnya,
- intervensi dilaksanakan secara komprehensif baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bantuan raskin, sembako baik secara subsidi maupun charity, pemberdayaan usaha dengan aneka kegiatan seperti bantuan usaha kelompok ternak, kelompok ikan,
- instansi/institusi yang terlibat antara lain: KPPD, Dinas Perindagkop, Dinas KPP, Dinas Pertanian, Camat, Lurah, dan lain-lain.

2. Indikator Sandang:

- sebagian besar anggota keluarga tidak memiliki pakaian pantas pakai minimal enam stel,

- indikator sandang adalah indikator yang berkaitan dengan atau yang dapat menggambarkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sandang, terutama yang berkaitan dengan lebih dari sebagian anggota keluarga memiliki pakaian pantas pakai minimal sejumlah enam stel,
- yang dimaksud dengan stel adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh bagian atas dan bagian bawah, tidak harus seragam, sedangkan yang dimaksud pantas pakai adalah pakaian yang menurut pandangan masyarakat setempat layak digunakan di tempat umum,
- bentuk intervensi bantuan pakaian pantas pakai dalam berbagai moment kegiatan HUT, pemberdayaan masyarakat melalui lelang kepedulian,
- instansi/institusi yang terlibat ditunjuk lembaga instansi/institusi khusus yang mengkoordinasikan kegiatan ini.

3. Indikator Papan:

- tempat tinggal/rumah adalah berlantai tanah, berdinding bambu, dan beratap rumbia,
- indikator papan adalah indikator yang berkaitan dengan atau yang dapat menggambarkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal/papan terutama yang berkaitan dengan tempat tinggal/rumah sebagian besar (atau lebih dari 50%) masih berlantai tanah atau berdinding bambu atau beratapkan rumbia
- intervensi dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk bantuan pemugaran rumah, lantainisasi melalui pemberdayaan masyarakat berupa gotong royong, lelang kepedulian,
- instansi/institusi yang terlibat antara lain: Bappeda, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Bagian AP, PMD, dan lain-lain.

4. Indikator Penghasilan:

- jumlah penghasilan yang diterima seluruh anggota keluarga yang berusia 16 tahun ke atas (termasuk KK) rata-rata per bulan kurang dari Rp. 800.000,00,
- indikator penghasilan adalah indikator yang berkaitan dengan atau yang dapat menggambarkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar

- hidup, terutama yang berkaitan dengan paling sedikit satu orang anggota keluarga yang berumur 16 tahun ke atas mempunyai sumber penghasilan.
- pengertian sumber penghasilan meliputi mempunyai pekerjaan, mempunyai usaha, sawah, kebun dan ternak yang produktif, dan usaha di bidang jasa yang menghasilkan uang, jumlah penghasilan seluruh anggota keluarga (yang berusia 16 tahun ke atas, baik yang berupa uang maupun berupa barang, rata-rata setiap bulan tidak lebih dari Rp. 800.000,00.
 - misalkan seorang buruh tani mendapat imbalan/upah tidak berupa uang, akan tetapi berupa gabah, maka penghasilannya harus dinilai dengan uang seharga gabah yang diperoleh (menurut patokan harga gabah setempat).
 - intervensi dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk pemberian kesempatan kerja, bantuan modal usaha, pengembangan jaringan pasar, pelatihan ketrampilan, santunan, dan lain-lain.
 - instansi/institusi yang terlibat antara lain: Dinsos, BKK PP KB, PMD, Bagian AP, Disperindagkop, Disnakertrans, Dinas PU (P2KP), dan lain-lain.

5. Indikator Kesehatan:

- Jika ada anggota keluarga yang sakit, tidak mampu berobat ke fasilitas kesehatan modern.
- Indikator kesehatan adalah indikator yang berkaitan dengan atau yang dapat menggambarkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan kesehatan terutama yang berkaitan dengan: jika ada anggota keluarga yang sakit atau memerlukan pelayanan kesehatan lainnya, keluarga tersebut tidak mampu mengakses/mendapatkan pelayanan ke fasilitas kesehatan masyarakat (Mantri Kesehatan, Bidan, Balai/Klinik Pengobatan, Puskesmas, Rumah Sakit, Dokter Praktek Swasta, Sarana Pengobatan Alternatif),
- Kemampuan mengakses/mendapatkan pelayanan kesehatan bukan karena keluarga tersebut menggunakan Askes Gakin,
- Intervensi yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk pemberian jaminan kesehatan Jamkesmas, Jamkesos, bantuan transportasi, bantuan pendampingan keluarga yang sakit,
- Instansi/institusi yang terlibat antara lain: Dinsos, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Kecamatan, Desa, dan lain-lain.

6. Indikator Pendidikan:

- Keluarga tidak mampu menyekolahkan anak yang berumur 7 sampai 15 tahun,
- Indikator pendidikan adalah indikator yang berkaitan dengan atau yang dapat menggambarkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan wajib belajar sembilan tahun terutama yang berkaitan dengan keluarga tidak mampu (bukan karena tidak mau) menyekolahkan anggota keluarganya yang berumur 7-15 tahun atau ke jenjang SD-SMP,
- Intervensi dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk biaya anak sekolah, bantuan operasional sekolah, bantuan beasiswa, bantuan ketrampilan bagi anak putus sekolah, bantuan modal usaha bagi anak putus sekolah,
- Instansi/institusi yang terlibat antara lain: Dinsos, Dinas Pendidikan, Dewan Sekolah, DEPAG, dan lain-lain.

7. Indikator Kekayaan:

- Jumlah kekayaan yang dimiliki keluarga di luar tanah dan bangunan < Rp. 2.500.000,00; dan tanah dan bangunan yang ditempati bukan miliknya,
- Indikator Aspek Kekayaan, dibedakan menjadi dua pengertian:
- Jumlah kekayaan milik keluarga adalah indikator yang menunjukkan jumlah nilai rupiah kekayaan yang dimiliki secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh seluruh keluarga dimaksud (termasuk KK nya). Yang dimaksud nilai rupiah/uang adalah nilai semua barang yang dimiliki berdasarkan perkiraan harga pasar barang-barang tersebut saat ini di wilayah setempat. Barang-barang tersebut misalnya ternak, sepeda motor, sepeda onthel, lemari, buffet, barang-barang elektronik, perhiasan, dan lain-lain). Nilai perkiraan jumlah semua barang dimaksud lebih kecil atau sama dengan Rp. 2.500.000,00.
- Tanah dan bangunan yang dimaksud adalah status kepemilikan tanah dan bangunan yang ditempati keluarga tersebut saat ini.
- Intervensi dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk pemberdayaan ekonomi keluarga melalui bantuan modal usaha bagi yang memiliki usaha, bantuan pelatihan ketrampilan, sarana penunjang usaha,

- Instansi/institusi yang terlibat antara lain: Dinsos, Bagian AP, Disperindagkop, Disnakertrans, Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas PKP.

8. Indikator Akses Air Bersih:

- tidak menggunakan air bersih untuk keperluan makan, minum, MCK,
- indikator akses air bersih adalah kemampuan/kesempatan mengakses/mendapatkan air bersih,
- indikator akses air bersih adalah apakah keluarga tersebut mampu memperoleh dan menggunakan air bersih untuk keperluan makan, minum, dan MCK dari sumber yang tidak harus milik sendiri, bisa milik tetangga atau kerabatnya,
- intervensi dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk bantuan sarana pengadaan air bersih, pengembangan jaringan air bersih,
- instansi/institusi yang terlibat antara lain: Bappeda, Dinas PU, PDAM, Bagian AP, dan lain-lain.

9. Indikator Akses Listrik:

- tidak menggunakan listrik untuk kebutuhan rumah tangga,
- indikator kemampuan/kesempatan mengakses/mendapatkan akses listrik adalah apakah keluarga tersebut mampu memperoleh dan menggunakan akses listrik untuk kebutuhan rumah tangga,
- intervensi dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk bantuan sarana dan jaringan listrik/listrikisasi,
- instansi/institusi yang terlibat antara lain: Bappeda, Dinas PU, PLN, Bagian AP, dan lain-lain.

10. Indikator Jumlah Jiwa:

- Jumlah jiwa dalam keluarga > 5 jiwa termasuk KK,
- indikator jumlah jiwa adalah indikator yang berkaitan dengan jumlah seluruh anggota/jiwa dalam satu keluarga,
- intervensi dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk transmigrasi, pemberdayaan keluarga melalui bantuan modal usaha dan KB,
- instansi/institusi yang terlibat antara lain: Bappeda, Dinsos, Disnakertrans, Disperindagkop, Bagian AP, BKK PP KB, dan lain-lain.

Melalui pendekatan indikator keluarga miskin dilihat dari kesepuluh indikator di atas, SKPD pengampu pronangkis di Kabupaten Bantul selanjutnya dapat membuat profil keluarga miskin yang selanjutnya dapat diberikan bantuan langsung dan pemberdayaan untuk mengentaskan mereka dari keluarga miskin menjadi keluarga sejahtera dan mandiri (keluarga miskin mentas).

Sasaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul dapat dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Kelompok marginal/rawan miskin, yaitu keluarga yang rentan terhadap masalah sosial ekonomi, PHK atau jika jatuh sakit tidak mampu berobat ke perawatan lanjutan,
2. Kelompok miskin, yaitu keluarga yang memiliki potensi yang dapat diberdayakan, dan
3. Kelompok miskin sekali, yaitu keluarga yang tidak dapat diberdayakan, namun perlu diberi santunan.

Skema penanggulangan kemiskinan di Kabupaten secara terperinci dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. Skema Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa dengan adanya kebijakan secara komprehensif, kesamaan data mikro, dan intervensi aksesibilitas terhadap program-program penanggulangan kemiskinan maka diharapkan keluarga miskin sekali, keluarga miskin, dan keluarga marginal dapat berubah menjadi keluarga tidak miskin.

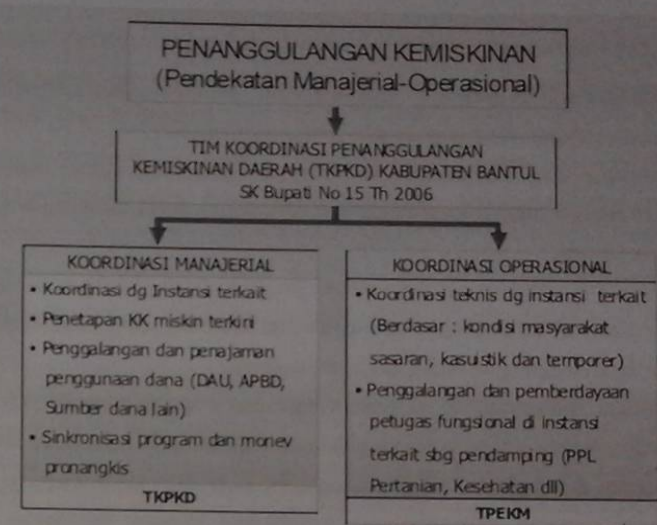
Adapun alur perencanaan dan penganggaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3. Alur Perencanaan dan Penganggaran Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa kegiatan perencanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul mulai dari penyusunan RPJP daerah, diikuti penyusunan RPJM daerah yang menghasilkan renstra perencanaan kemiskinan (5 tahun), dan dilanjutkan penyusunan RPKD yang menghasilkan renja perencanaan kemiskinan (1 tahun). Kegiatan perencanaan selanjutnya diikuti dengan upaya penganggaran mulai dari penyusunan KUA PPAS, diikuti penyusunan RAPBD yang menghasilkan RKA penganggaran kemiskinan, dan dilanjutkan penyusunan APBD yang memuat penjabaran APBD untuk program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul.

Secara skematis pengkoordinasian penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul secara manajerial maupun operasional tergambar dalam gambar berikut ini.



Gambar 4. Bagan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan manajerial dan operasional

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul dilakukan dengan pendekatan manajerial-operasional. Koordinator penanggulangan kemiskinan tersebut adalah TKPKD Kabupaten Bantul sesuai SK Bupati No. 15 tahun 2006. TKPKD melakukan koordinasi baik secara manajerial dengan TKPKD maupun secara operasional dengan TPEKM.

D. Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul

1. Visi, Misi, dan Tujuan Program Penanggulangan Kemiskinan

- a. Visi: "Bantul Sejahtera Mandiri berdasarkan semangat Projotamansari, Agamis, dan Demokratis", yang mengandung pengertian bahwa tujuan bersama antara pemerintah dan masyarakat Kabupaten yang ingin mewujudkan kondisi Kabupaten Bantul Sejahtera dan Mandiri, dimana kebutuhan dasar keluarga telah terpenuhi secara lahir batin melalui program penanggulangan kemiskinan yang berkesinambungan dan diwujudkan melalui Misi.

- b. Misi :
- 1) Melakukan sinergi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul yang terpadu dan berkesinambungan,
 - 2) Membangun dan memperkuat keswadayaan serta kemandirian masyarakat Bantul sebagai upaya menanggulangi kemiskinan untuk menuju masyarakat yang sejahtera,
 - 3) Menyusun rancangan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul dengan berasaskan rasa keadilan, partisipatif, kerjasama, dapat dipertanggungjawabkan dan berkelanjutan,
 - 4) Senantiasa melakukan revisi pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan maupun program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul,
 - 5) Senantiasa meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan penyusunan rancangan program kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan memegang teguh terhadap kepentingan masyarakat miskin di Kabupaten Bantul yang mengarah pada ketepatan sasaran dan hasil dari aplikasi program kegiatan yang dilaksanakan maupun yang dirancang, dan
 - 6) Melakukan validasi data secara berkala sebagai bagian dari upaya dalam perencanaan dan penciptaan kondisi masyarakat Bantul, sehingga dapat diperoleh hasil dari program kegiatan seperti yang diharapkan.

c. Tujuan: terjadinya sinergi program antar *stakeholder* sehingga secara bersama-sama tercapai hasil berupa jumlah penduduk miskin berkurang dan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.

2. Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul

Pemerintah Kabupaten Bantul telah banyak mengupayakan program-program untuk penanggulangan kemiskinan. Implementasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Program penanggulangan kemiskinan dilakukan secara lintas sektor, meliputi beberapa instansi/institusi yang terlibat antara lain: BKK PP dan KB, PMD, Dinsos, Disnakertrans, Dinas PU, Dinas Pengairan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, dan lain-lain sebagai SKPD pengampu pronangkis.

2. Program penanggulangan kemiskinan selalu ditempatkan dan diposisikan pada prioritas utama dan pertama dalam pembangunan daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3. Program-program yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan/pendapatan penduduk miskin antara lain melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD pengampu pronangkis.

Kabupaten Bantul pada tahun 2009 memiliki 50 program penanggulangan kemiskinan utama berikut SKPD pengampunya yang tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7. Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2009 beserta SKPD Pengampunya

NAMA SKPD	NO. PROG.	NAMA-NAMA PROGRAM TAHUN 2009
DINKES	1	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
	2	Obat dan Perbekalan Kesehatan
	3	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	4	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
	5	Pengamanan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
	6	Pengawasan Obat dan Makanan
	7	Pengembangan Lingkungan Sehat
	8	Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak
	9	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
	10	Perbaikan Gizi Masyarakat
	11	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
	12	Standarisasi pelayanan kesehatan

	13	Upaya Kesehatan Masyarakat	
DINSOS	14	Bantuan Langsung	
	15	Bantuan Siswa Berprestasi	
	16	Banyankes	
	17	Kompensasi BBM	
	18	KUBE	
	19	Program Keluarga Harapan	
	20	Raskin	
	21	Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	
	22	USEP KM	
KPP	23	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	
	24	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	
	25	Pemberdayaan masyarakat	
	26	Pengembangan Budidaya Perikanan	
	27	Pengembangan Perikanan Tangkap	
	28	Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	
	29	Pengembangan Sumberdaya Perikanan	
	30	PNPM-MKP	
	DISNAKERTRANS	31	Peningkatan Ketrampilan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK)
		32	Perluasan & Pengembangan Kesempatan Kerja(PPKK)
33		Peningkatan Kesempatan Kerja	
34		Transmigrasi Umum	

	35	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	
DISPERTAHUT	36	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	
	37	Peningkatan Kesejahteraan Petani	
	38	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	
PEMDES	39	CDMK (Community Development - Mengentaskan Kemiskinan)	
	40	KESGA (Kredit Kesejahteraan Keluarga)	
BKK PP dan KB	41	KUPK (Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan)	
	42	AKU	
	43	UPPKS	
	44	JAMKESOS (Jaminan Kesejahteraan Sosial)	
	45	JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat)	
	46	PEKM (Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin)	
	47	POSDAYA	
	48	KB/KR (Keluarga Berencana/ Kesehatan Produksi)	
	DPU	49	PNPM PPK
		50	PNPM MP

Selain program-program di atas, masih ada program-program pengentasan kemiskinan lain yang dapat dilihat pada lampiran laporan penelitian ini. Dari 50 program pronanggis utama di Kabupaten Bantul, program yang diampu oleh BKK PP dan KB ada 9 (sembilan) program, antara lain: KESGA, KUPK, AKU, UPPKS, JAMKESOS, JAMKESMAS, PEKM, POSDAYA, dan KB/KR.

3. Keefektifan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul

Total anggaran program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul setiap tahunnya mengalami perubahan, disesuaikan dengan kemampuan daerah. Dalam penelitian ini akan dilihat kesenjangan total anggaran program penanggulangan kemiskinan 2 (dua) tahun terakhir, yaitu tahun 2009 dan 2010. Anggaran program penanggulangan kemiskinan tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2009

No.	Sumber Dana	Total Anggaran (Rp)
1.	APBD Kabupaten	51.204.019.635
2.	APBD Provinsi	6.999.900.000
3.	APBN	126.575.662.615
4.	Lainnya	14.291.616.000
	Jumlah	199.071.198.250

Sumber: Pemkab Bantul, Desember 2010

Sedangkan anggaran program penanggulangan kemiskinan tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2010

No.	Sumber Dana	Total Anggaran (Rp)
1.	APBD Kabupaten	18.675.454.532
2.	APBD Provinsi	5.539.136.424
3.	APBN	46.922.940.056
4.	Lainnya	12.809.926.000
	Jumlah	83.947.457.012

Sumber: Pemkab Bantul, Desember 2010

Dari data pada kedua tabel di atas dapat diketahui bahwa total anggaran program penanggulangan kemiskinan pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar Rp. 115.123.741.238,00 (58%) dibandingkan tahun 2009.

Untuk melihat seberapa efektif total anggaran program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul tahun 2009 dan 2010 dalam mengentaskan KK miskin dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2009

1. Jumlah KK miskin tahun 2008 = 57.539 KK miskin
2. Jumlah KK miskin tahun 2009 = 47.015 KK miskin
3. Penurunan jumlah KK miskin = 10.524 KK miskin
4. Anggaran program penanggulangan kemiskinan = Rp.199.071.198.250,00
5. Jika diasumsikan semua program dialokasikan untuk setiap KK miskin, maka serapan dana untuk setiap KK miskin per tahun:

$$= \text{Rp.}199.071.198.250,00 : 57.539 = \text{Rp.} 3.459.761,00$$

6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2009, dengan pemberian bantuan dana sejumlah Rp. 3.459.761,00/KK miskin dapat menurunkan jumlah KK miskin di Kabupaten Bantul sebanyak 10.524 KK miskin.

2. Tahun 2010

1. Jumlah KK miskin tahun 2009 = 47.015 KK miskin
2. Jumlah KK miskin tahun 2010 = 41.480 KK miskin
3. Penurunan jumlah KK miskin = 5.535 KK miskin
4. Anggaran program penanggulangan kemiskinan = Rp.83.947.457.012,00
5. Jika diasumsikan semua program dialokasikan untuk setiap KK miskin, maka serapan dana untuk setiap KK miskin per tahun:

$$= \text{Rp.}83.947.457.012,00 : 47.015 = \text{Rp.} 1.785.546,00$$

6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2010, dengan pemberian bantuan dana sejumlah Rp. 1.785.546,00/KK miskin dapat menurunkan jumlah KK miskin di Kabupaten Bantul sebanyak 5.535 KK miskin.

Selain dikaji serapan dana keseluruhan untuk penanggulangan program kemiskinan di Kabupaten Bantul tahun 2009 dan 2010, berikut ini juga akan dilihat serapan dana untuk salah satu program yang diampu BKK PP dan KB, yaitu KESGA (Kredit Kesejahteraan Keluarga) tahun 2010 dan 2011. Berikut ini disajikan perkembangan realisasi KESGA Kabupaten Bantul tahun 2010 dan 2011.

Tabel 10. Perkembangan Realisasi KESGA Kabupaten Bantul Tahun 2010-2011

No.	Kecamatan	Tahun 2010			Tahun 2011 (s.d. Nov 2011)		
		Jml Kel	Jml Anggt	Jml Kredit(Rp)	Jml Kel.	Jml Anggt	Jml Kredit (Rp)
1	Kretek	5	65	145.000.000	1	10	20.000.000
2	Sanden	5	85	121.000.000	2	31	40.000.000
3	Srandakan	4	40	50.000.000	0	0	0
4	Pandak	2	21	21.000.000	2	21	44.000.000
5	Bambanglipuro	0	0	0	0	0	0
6	Pundong	1	10	25.000.000	0	0	0
7	Imogiri	10	124	141.000.000	5	52	84.000.000
8	Dlingo	3	40	40.000.000	0	0	0
9	Jetis	2	20	20.000.000	0	0	0
10	Bantul	18	156	279.000.000	5	68	113.000.000
11	Pajangan	0	0	0	0	0	0
12	Sedayu	4	61	111.000.000	13	155	168.000.000
13	Kasih	4	65	111.000.000	0	0	0
14	Sewon	15	180	309.000.000	8	128	278.000.000
15	Piyungan	8	128	248.000.000	0	0	0
16	Pleret	3	40	45.000.000	4	65	142.000.000
17	Banguntapan	11	143	207.000.000	8	116	238.500.000
	Jumlah	95	1.178	1.873.000.000	53	701	1.202.500.000

Dari tabel di atas dapat diketahui total anggaran penanggulangan kemiskinan yang dianggarkan melalui SKPD BKK PP dan KB sampai dengan November 2011 adalah sebesar Rp. 1.202.500.000,00 atau mengalami penurunan dibanding tahun 2010 yang sebesar Rp. 1.873.000.000,00. Dari tabel dapat diketahui bahwa Kecamatan Bambanglipuro dan Pajangan tidak mendapatkan anggaran KESGA pada tahun 2010 dan 2011. Di samping itu ada beberapa kecamatan yang pada tahun 2010 mendapatkan anggaran KESGA, namun pada tahun 2011 tidak mendapatkan kembali,

diantaranya Kecamatan Srandakan, Pundong, Dlingo, Jetis, Kasihan, dan Piyungan. Peningkatan jumlah anggaran KESGA dijumpai di Kecamatan Pandak, Sedayu, Pleret, dan Banguntapan, sedangkan penurunan anggaran dijumpai di Kecamatan Kretek, Sanden, Imogiri, Bantul, dan Sewon. Secara keseluruhan dari tabel dapat dilihat bahwa sebaran anggaran KESGA tidak seragam untuk masing-masing kelompok sasaran di masing-masing Kecamatan, baik pada tahun 2010 maupun 2011, hal ini kemungkinan dipengaruhi kebijakan dari SKPD pengampu.

E. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul

Beberapa kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul, antara lain:

1. Koordinasi antar instansi, antar pelaku dan antar wilayah (penanggulangan kemiskinan perlu dimulai dari penataan kebijakan dan kelembagaan melalui koordinasi dan kerjasama, sehingga dicapai suatu arah yang dapat diikuti oleh berbagai pihak yang ingin terlibat dalam penanggulangan kemiskinan).
2. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan (menjaring aspirasi warga masyarakat, pembentukan kader pendamping, penguatan kelembagaan, masyarakat, perencanaan partisipatif, dan pengembangan program terpadu).
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat (prioritas pada peningkatan kecerdasan dan pelayanan kesehatan masyarakat).
4. Peningkatan produktivitas keluarga melalui diversifikasi usaha dan kelembagaan ekonomi rakyat (pengembangan usaha ekonomi produktif keluarga yang berbasis sumber daya lokal dan pemantapan kemitraan).
5. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat melalui berbagai peran dan fungsi sosial dan budaya pengembangan produk seni dan budaya, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan ketahanan daerah dan kehidupan sosial keagamaan (Pemkab Bantul, 2010).

Untuk mendukung pengembangan kebijakan penanggulangan kemiskinan diperlukan sebagai berikut:

1. Pemetaan dan peningkatan serta pemanfaatan potensi (sumber daya alam, sumber daya manusia, pasar, dan kreatifitas yang tersedia di Kabupaten Bantul).

2. Mengembangkan *poverty mainstreaming* dalam setiap kebijakan pembangunan di Kabupaten Bantul.

Kabupaten Bantul menerapkan beberapa strategi (opsi kebijakan) untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan, antara lain:

1. Koordinasi dan sinergi kelembagaan.
2. Inisiasi dan partisipasi masyarakat.
3. Pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Diversifikasi ekonomi.
5. Pengembangan sosial budaya.
6. Penyusunan kriteria/indikator kemiskinan riil, dan
7. *Up dating* data keluarga miskin.

Manfaat dan kelemahan dari setiap opsi kebijakan untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinergi kelembagaan
Manfaat: terwujudnya sinergi program lintas sektoral
Kelemahan: memerlukan koordinasi yang riil dari tingkatan bawah sampai atas
2. Inisiasi dan partisipasi masyarakat
Manfaat: mengurangi dampak konflik kepentingan
Kelemahan: memerlukan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang besar
3. Pemenuhan kebutuhan dasar
Manfaat: terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga
Kelemahan: membutuhkan serapan anggaran dana cukup besar
4. Diversifikasi ekonomi
Manfaat: terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat miskin
Kelemahan: keterbatasan modal dan tenaga ahli yang memadai serta minimnya ruang untuk pemasaran hasil produksi
5. Pengembangan sosial budaya
Manfaat: terciptanya komersialisme (penghargaan) sosial budaya
Kelemahan: ketidakkontinuan *event* budaya di setiap wilayah
6. Penyusunan kriteria/indikator kemiskinan riil
Manfaat: terciptanya kesamaan data terutama parameter miskin
Kelemahan: adanya generalisasi kategori kemiskinan

7. *Up dating* data keluarga miskin

Manfaat: terciptanya data terbaru yang *up to date*

Kelemahan: kesulitan dalam melakukan *up dating* data keluarga miskin karena ketidaksamaan data dari beberapa instansi/institusi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sebagian besar KK miskin di Kabupaten Bantul berjenis kelamin laki-laki (69,3%), berstatus kawin yaitu sebanyak 29.454 KK (64,7%), berpendidikan SD yaitu sebanyak 18.607 KK (39,6%), bekerja sebagai buruh lainnya yaitu sebanyak 12.548 KK (26,7%), pendidikan anak dalam KK miskin adalah SD yaitu sebanyak 14.118 anak (55,7%), dan potensi yang dimiliki anggota keluarga yang berusia 16 tahun ke atas adalah tidak mempunyai keterampilan yaitu sebanyak 34.314 orang (55,5%).
2. Program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul telah dicanangkan sejak tahun 2005. Prioritas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul semakin diefektifkan dengan penambahan program yang semula berjumlah 30 program, selanjutnya setelah tahun 2009, Kabupaten Bantul memiliki 50 program pengentasan kemiskinan, diantaranya 9 program diampu oleh BKK PP dan KB.
3. Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan telah memberikan dampak penurunan jumlah jiwa miskin di Kabupaten Bantul sejak tahun 2007 hingga 2010. Pada tahun 2009, dengan pemberian bantuan dana sejumlah Rp. 3.459.761,00/KK miskin dapat menurunkan jumlah KK miskin di Kabupaten Bantul sebanyak 10.524 KK miskin, sedangkan pada tahun 2010, dengan pemberian bantuan dana sejumlah Rp. 1.785.546,00/KK miskin dapat menurunkan jumlah KK miskin di Kabupaten Bantul sebanyak 5.535 KK miskin.
4. Kebijakan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:
 - 1) Koordinasi antar instansi, antar pelaku dan antar wilayah (penanggulangan kemiskinan perlu dimulai dari penataan kebijakan dan kelembagaan melalui

koordinasi dan kerjasama, sehingga dicapai suatu arah yang dapat diikuti oleh berbagai pihak yang ingin terlibat dalam penanggulangan kemiskinan).

- 2) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan (menjaring aspirasi warga masyarakat, pembentukan kader pendamping, penguatan kelembagaan, masyarakat, perencanaan partisipatif dan pengembangan program terpadu),
- 3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat (prioritas pada peningkatan kecerdasan dan pelayanan kesehatan masyarakat),
- 4) Peningkatan produktivitas keluarga melalui diversifikasi usaha dan kelembagaan ekonomi rakyat (pengembangan usaha ekonomi produktif keluarga yang berbasis sumber daya lokal dan pemantapan kemitraan), dan
- 5) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat melalui berbagai peran dan fungsi sosial dan budaya pengembangan produk seni dan budaya, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan ketahanan daerah dan kehidupan sosial keagamaan.

B. SARAN

1. Data base kemiskinan konsisten pada satu dinas terkait, sehingga tidak ada kendala karena perbedaan data.
2. Monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan perlu diperkuat, jika memungkinkan dilakukan secara reguler (6 bulan) dan ditangani oleh TKPKD Kabupaten Bantul.
3. Pentingnya penelitian di bidang kependudukan dan kemiskinan untuk terus dikembangkan secara komprehensif dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. 2010. Draft Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2025.
- Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, Bappenas dan Project Pro-Poor Planning and Budgeting. 2007. Kumpulan Bahan Latihan Pemantauan dan Evaluasi Program-Program Pengentasan Kemiskinan.
- <http://ditpk.bappenas.go.id>. 2011. Kandidat Dirjen FAO dari Indonesia Tawarkan Reformasi. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan (Indroyono Soesilo).
- Irawan Soehartono. 1995. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Komite Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia. 2002. Buku Putih: Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia.
- LP3ES. 2007. Laporan Akhir Kajian Cepat Terhadap Program-Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Indonesia: Program Infrastruktur Perdesaan (PIIP, PMPD DAN P2MPD).
- Masri Singarimbun. 1989. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: LP3S.
- Pemkab Kabupaten Bantul. 2010. Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor: 21.A Tahun 2007 Tentang Indikator Keluarga Miskin Kabupaten Bantul.
- Suharsimi Arikunto. 2004. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- www.kopel-online.com. Pengentasan Kemiskinan, Prioritas Pembangunan di Bantul. Selasa, Tanggal 29 November 2011.

